

Strategi Pemerintah Desa Ranggagata Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Sripe Wafiq Azizah¹, Ilham Zitri², Hidayatullah³, Azwar Subandi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: sripewafiqazizah12@gmail.com

Keyword:

Village economic development; community economic empowerment; Village-Owned Enterprises (BUMDes); Village Budget (APBDes), Kioskization

Abstract: Rural economic development is an important aspect of improving the welfare of rural communities. However, in many regions, including West Nusa Tenggara Province (NTB), rural economic growth still faces various limitations. Ranggagata Village in Central Lombok Regency is an agricultural village where the majority of the population depends on seasonal rice farming for their livelihood. This condition causes unstable community income and encourages the emergence of various alternative economic strategies. This study aims to analyze the economic conditions of the Ranggagata Village community and the role of the village government in community economic empowerment efforts. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through field observations, interviews with village officials, BUMDes managers, and the community, as well as a documentation study of the APBDes and village planning documents. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, accompanied by data triangulation to maintain the validity of the findings. The results of the study show that the village economy is still dependent on a single agricultural sector, while BUMDes is not yet functioning optimally. The allocation of the economic empowerment budget in the APBDes is relatively low and is not fully in line with applicable regulations. This condition has given rise to the phenomenon of kioskization as a survival strategy for the community, but has not been able to improve welfare in a sustainable manner. This study recommends strengthening village economic institutions, increasing the allocation of empowerment budgets, and developing data-based local economic potential so that village economic development is more effective and sustainable

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah tercermin dari meningkatnya kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa dari tahun ke tahun, yang diukur berdasarkan tahun dasar tertentu. Dalam konteks Indonesia, laju pertumbuhan tersebut dapat dilihat melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni hasil penjumlahan nilai tambah dari berbagai komoditas yang tersebar pada tujuh belas sektor ekonomi. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki dinamika ekonomi yang beragam, seiring dengan variasi jenis barang dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam proses penghitungan agar tidak terjadi perhitungan ganda, terutama dalam membedakan antara bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang akhir. Menurut Lincoln Arsyad (2010), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi mutlak dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengejar ketinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara maju, seperti halnya dengan Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil (Elvandry, 2013). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sedang berjalan. Pada mulanya upaya pembangunan negara yang sedang berkembang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan per kapita, atau biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi (Arsa, 2015). Pada awalnya, banyak pihak berpendapat bahwa perbedaan antara negara maju dan negara berkembang semata-mata ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan pun sering diukur hanya dari

peningkatan pendapatan nasional per kapita riil. Pandangan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dianggap berhasil apabila laju kenaikan pendapatan nasional dalam harga konstan (setelah memperhitungkan faktor inflasi) mampu melampaui laju pertumbuhan penduduk.

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya daerah. Sebaliknya, apabila laju pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi gambaran nyata mengenai sejauh mana keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi Provinsi NTB kurang berhasil dibandingkan dengan pembangunan ekonomi Provinsi lain di wilayah Indonesia Tengah. Laju pertumbuhan ekonomi NTB (1,80%). Bali (5,71%). NTT (3,52%). Kalimantan Barat (4,46%). Kalimantan Tengah (4,14%). Kalimantan Selatan (4,84%). Kalimantan Timur (6,22%). Kalimantan Utara (4,94%). Sulawesi Utara (5,48%). Sulawesi Tengah (11,91%). Sulawesi Selatan (4,51%). Sulawesi Tenggara (5,35%). Sulawesi Barat (5,25%). Gorontalo (4,50%). (Statistik Indonesia 2024).

Laju pertumbuhan ekonomi NTB yang rendah mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat NTB lebih rendah dari tingkat kesejahteraan provinsi lainnya, seperti Desa Ranggagata. Desa Ranggagata adalah desa agraris dengan mayoritas warganya menggantungkan hidup dari pertanian padi dan menjadi buruh tani di sawah orang lain. Ketergantungan yang tinggi pada sektor ini membuat ekonomi desa sangat rentan terhadap fluktuasi harga gabah, perubahan cuaca, dan gagal panen.

Pertanian di Desa Ranggagata tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui hasil pertanian yang dapat dipasarkan, baik di tingkat lokal maupun ke wilayah yang lebih luas. Namun demikian, sektor pertanian di Desa Ranggagata juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana irigasi, perubahan iklim, serta keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern. Kondisi ini menuntut adanya upaya pemerintah desa untuk peningkatan kapasitas petani, pengelolaan lahan yang lebih baik, serta dukungan dari berbagai pihak agar sektor pertanian mampu berkembang secara berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena baru muncul yaitu hampir setiap rumah memiliki kios kecil. Masyarakat menjual sembako, jajanan anak, hingga pulsa. Pada satu sisi, hal ini bisa dibaca sebagai semangat kewirausahaan namun di sisi lain, ini adalah sinyal darurat ekonomi dimana ketika sawah tidak cukup memberi penghasilan, masyarakat mencari alternatif dengan cara yang paling mudah mereka lakukan.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan utama Desa Ranggagata adalah semua masyarakatnya adalah seorang "Petani". Selain musim tanam dan musim panen, masyarakat tidak punya penghasilan lainnya, selain menjadi UMKM baru yang hanya jualan di tempat. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan ini. Dan juga peneliti dapat mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya kelompok tani di Desa Ranggagata. Selain itu, melalui artikel ini peneliti akan memberikan masukan kepada Pemerintah Desa terkait beberapa solusi lain yang akan ditawarkan nantinya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang objek yang diteliti dalam kondisi aslinya. Pendekatan ini tidak melibatkan manipulasi terhadap objek, sehingga keadaan objek sebelum dan setelah penelitian tetap relatif tidak berubah (Sugiono, 2021: 1-2). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan kualitatif, dengan fokus pada kata-kata dan tindakan sebagai data utama, sementara dokumen dan sumber lainnya berfungsi sebagai pelengkap (Moleong, 2007: 157). Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dan observasi langsung di lapangan, dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden terkait dengan topik penelitian dan mencatat temuan yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan lokasi fokus penelitian untuk menggali informasi terkait permasalahan yang ada di desa dan solusi yang bisa diberikan kepada pemerintah desa.

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi lapangan untuk melihat langsung kondisi ekonomi di desa, wawancara dengan Kepala Desa Ranggagata, Direktur BUMDes Ranggagata, dan warga desa sebanyak 2 orang, serta dokumentasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi desa. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Basrowi dan Suwandi, 2008), yang terdiri dari tiga kegiatan utama: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan transformasi data kasar yang diperoleh selama penelitian, yang dilakukan sepanjang proses penelitian. Penyajian data adalah pengorganisasian informasi secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan, yang dapat berupa narasi tekstual, matriks, atau bagan. Proses ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi data yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan merumuskan proposisi berdasarkan prinsip logika, mengidentifikasi temuan penelitian, dan melakukan pengkajian berulang terhadap data yang terkumpul serta proposisi yang telah dibuat. Dalam penelitian ini juga diterapkan teknik triangulasi untuk memverifikasi temuan yang ada. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi data dari berbagai pihak yang memberikan informasi, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil dari satu narasumber menggunakan metode yang berbeda, dan triangulasi waktu mempertimbangkan kondisi narasumber, mengingat waktu pengambilan data dapat mempengaruhi keakuratan informasi yang diperoleh. Selain itu, dalam penelitian ini juga diterapkan teknik pengambilan responden yaitu purposive sampling.

HASIL DAN DISKUSI

Ranggagata adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak. Desa Ranggagata Terdiri dari 10 Dusun, Yakni Dusun Ranggagata, Dusun Montong, Dusun Berobot, Dusun Aik Ampat, Dusun Dasan Dao, Dusun Aik Gamang, Dusun Kemek, Dusun Gerunung, Dusun Kumbak, dan Dusun Batu Bintang. Saat ini desa Ranggagata Dipimpin Oleh Muhamad Haikal (Periode: 2022-2030). Wilayah Ranggagata berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Wilayah Desa Giri sasak (Kabupaten Lombok Barat) Sebelah Barat: Wilayah Desa Giri sasak (Kabupaten Lombok Barat) Sebelah Timur: Wilayah Desa Ungga Sebelah Selatan: Wilayah: 1. Desa Pelambik, Desa Teduh dan Desa Sorage. Letak desa ini berada di bagian tengah Pulau Lombok dan mayoritas penduduknya adalah petani.

Kondisi ekonomi pedesaan yang masih stagnan dan bergantung pada satu sektor utama dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan struktural. Menurut Cardoso dan Faletto (1979), ketergantungan struktural muncul ketika suatu masyarakat menggantungkan penghidupan pada satu komoditas atau satu sektor ekonomi yang dominan tanpa adanya diversifikasi yang kuat. Ketergantungan ini menyebabkan struktur ekonomi menjadi rapuh dan tidak responsif terhadap perubahan pasar maupun kondisi lingkungan. Dalam konteks pedesaan agraris, ketergantungan

pada pertanian tradisional membuat masyarakat rentan terhadap risiko gagal panen, perubahan iklim, atau fluktuasi harga komoditas.

Hasil penelitian yang dilaksanakan melalui observasi lapangan, telaah dokumen APBDes, serta wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, pelaku UMKM, dan masyarakat menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Desa Ranggagata masih berada pada fase ketergantungan struktural dan belum memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Struktur ekonomi desa masih bertumpu pada sektor pertanian, khususnya padi sebagai komoditas utama. Sementara itu, sektor hortikultura, jasa, dan UMKM belum berkembang secara optimal. Ketergantungan pada satu jenis komoditas membuat pendapatan masyarakat sangat fluktuatif, terutama pada musim kemarau panjang, gagal panen, atau ketika harga gabah turun. Kondisi ini kemudian melahirkan fenomena “kiosisasi”, yaitu usaha masyarakat membuka kios kecil di halaman rumah sebagai strategi bertahan hidup ketika pekerjaan di bidang pertanian menurun.

Hal di atas dibenarkan oleh Kepala Desa Ranggagata bapak Muhamad Haikal “Secara keseluruhan, perekonomian masyarakat masih cenderung stagnan. Tidak dapat dikatakan meningkat, namun juga tidak sepenuhnya menurun. Kondisi ekonomi terlihat stabil karena masyarakat sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, yang sifatnya musiman. Selain itu, beberapa pedagang kecil masih mengalami fluktuasi pendapatan. Secara garis besar, perekonomian masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan signifikan yang benar-benar dapat menopang kesejahteraan masyarakat”. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi dikarenakan kebingungan masyarakat mengenai jenis usaha yang dapat mereka kembangkan mencerminkan lemahnya literasi ekonomi, keterbatasan keterampilan, serta kurangnya akses terhadap pendampingan yang berkelanjutan. Pada titik ini, peran pemerintah desa menjadi sangat penting sebagai fasilitator pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi menyediakan fasilitas atau bantuan sesaat, tetapi juga perlu menyusun strategi yang terarah, memberikan pelatihan yang tepat guna, serta membuka akses pasar bagi usaha-usaha baru masyarakat. Tanpa intervensi aktif dan berkelanjutan dari pemerintah desa, masyarakat akan tetap terjebak dalam pola ekonomi tradisional yang tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan secara signifikan.

Fenomena kiosisasi ini muncul karena kebutuhan ekonomi yang mendesak serta minimnya peluang lapangan kerja non-pertanian. Meskipun hampir setiap dusun memiliki banyak kios kecil, kemampuan daya beli masyarakat yang terbatas menyebabkan usaha ini tidak berkembang dan hanya mampu memenuhi kebutuhan harian pemiliknya. Minimnya nilai tambah ini memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki semangat adaptif, tetapi tidak didukung oleh ekosistem ekonomi desa yang terencana dan terpadu.

Hal di atas ditanggapi oleh Kepala Desa Ranggagata mengatakan bahwa “Sebenarnya kondisi tersebut tidak efisien dan efektif. Jika di dusun yang kecil terdapat banyak kios, maka akan sulit mendapatkan pembeli dan roda perekonomian tidak berjalan dengan baik. Pemerintah desa pun tidak bisa melarang masyarakat membuka kios, karena dikhawatirkan masyarakat justru meminta bantuan kepada desa”. Di sisi lain, kepala desa menyampaikan bahwa “ada rencana untuk mengaktifkan kembali BUMDes pada tahun 2026. Ke depan, di area depan bangunan futsal yang dibangun menggunakan dana desa akan dibuka lapak-lapak desa. Produk-produk masyarakat dapat ditempatkan di sana. Selain itu, terdapat rencana untuk menambah lahan guna memperluas area tersebut sehingga dapat menjadi pusat perekonomian Desa Ranggagata. Kebetulan, di samping lokasi itu juga akan dibangun sebuah klinik oleh salah satu warga. Dengan adanya fasilitas tersebut, kawasan itu diperkirakan akan semakin ramai, sehingga lapak-lapak yang ada berpotensi berkembang menjadi sebuah pasar”.

Hal di atas disampaikan juga oleh Ibu Susi mengapa memilih membuka kios-kios kecil dengan alasan “Masyarakat memilih berdagang selain bertani karena penghasilan dari sektor pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan pendapatan dari bertani hanya diterima satu kali dalam enam bulan, sedangkan berdagang, meskipun keuntungannya tidak besar, dapat membantu mencukupi kebutuhan harian”.

Berdasarkan analisis saya sebagai peneliti, fenomena ini wajar terjadi karena berdagang merupakan aktivitas yang mudah dilakukan oleh masyarakat, sementara perekonomian mereka belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah. Seperti pernyataan kepala desa sebelumnya, seharusnya pemerintah desa tidak hanya mengatakan bahwa mereka “tidak berani melarang karena alasan tertentu”. Dalam situasi tersebut, pemerintah desa semestinya berperan aktif dalam mencari solusi yang tepat bagi masyarakat.

Tabel 1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Ranggagata Tahun Anggaran 2024/2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	68.937.050,00	6.900.000,00
Dana Desa	1.409.296.000,00	1,409.296.000,00
Alokasi Dana Desa	843.985.800,00	785.001.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	108.925.327,24	102.647.682,00
Bantuan Keuangan	49.200.000.00	49.200.000,00
Pendapatan Dan Lain-lain		3.543.710,89
TOTAL PENDAPATAN	2.480.344.177.24	2.356.588.392,89
BIDANG PENYENGGAHAAN PEMERINTAH DESA		
Penyenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa	978.256 307.60	847.136.000,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.634.000,00	25.384.000,00 6
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.200.000,00	200.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.875 000,00	104.515.000.00
Sub Bidang Pertanahan	15.000.000.00	
JUMLAH BELANJA	1.136.965.307.60	983.235.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
Sub Bidang Pendidikan	22.655.000.00	18.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	167.440.000,00	162.540.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.012.000,00	300.012.000.00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	27.374.000,00	27.374.000.00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika	5.500.000,00	4.500.000.00
JUMLAH BELANJA	522.981.000,00	512.426.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	82.860.000,00	82.860.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.515.000,00	55.515.000,00
sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	624.011.500,00	621.785.500,00
JUMLAH BELANJA	762.386.500,00	760.160.500,00
BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.400.000,00	19.188.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	7.602.500,00	7.602.500,00
JUMLAH BELANJA	28.002.500,00	26.790.500,00
BIDANG BELANJA TAK TERDUGA		
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.631.327,24	
Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT DD)	36.000.000,00	36.000.000,00
JUMLAH BELANJA	48.631.327,84	36.000.000,00
JUMLAH BELANJA	2.498.966.634,84	2.318.612.000,00
SUPLUS / (DEFISIT)	(18.622.457,60)	37.976.392,89
PEMBIYAYAN		
Silpa Tahun Sebelumnya	18.622.457,60	18.552.457,60
JUMLAH PEMBIYAYAN	18.622.457,60	18.552.457,60
SILPA TSHUN BERJALAN	-	56.528.850,49

Sumber: ranggagata.desa.id

Peneliti juga memperlihatkan bahwa alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi dalam APBDes Tahun 2024/2025 masih sangat rendah. Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya sebesar Rp 28.002.500,00 atau sekitar 1,13% dari total anggaran desa sebesar Rp 2.480.344.177,24. Rendahnya alokasi ini tidak sejalan dengan Permendes Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa prioritas Dana Desa harus diarahkan pada pengembangan ekonomi, ketahanan pangan, dan penanganan kemiskinan.

Temuan peneliti semakin diperkuat dengan kondisi alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Menurut Permendes Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat 1 Huruf a, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Dana Desa diarahkan untuk BLT Desa dengan batas maksimal 15 persen dari total Dana Desa dan menggunakan data pemerintah sebagai acuan keluarga penerima manfaat. Namun, Pemerintah Desa Ranggagata justru memasukkan BLT Desa ke dalam sub-bidang "keadaan mendesak" dan hanya mengalokasikan 1,45% atau Rp 36.000.000 dari total APBDes Rp 2.480.344.177,24. Padahal, jika mengacu pada regulasi, Desa Ranggagata seharusnya dapat mengalokasikan sekitar Rp 372.051.626,6 atau 15% dari Dana Desa. Ketidaksesuaian penganggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum menempatkan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas strategis, dan hal ini berdampak langsung pada rendahnya intervensi terhadap kelompok masyarakat miskin.

Hal diatas dibenarkan oleh kepala desa Ranggagata bapak Muhamad Haikal mengatah bahwa "Permasalahan yang dialami petani lokal menunjukkan bahwa pemerintah desa belum memiliki peran aktif dalam pengembangan sektor pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat masih bersifat tradisional dan belum didukung oleh penerapan pertanian modern. Selain itu, pemerintah desa juga tidak memberikan dukungan yang memadai, sehingga masyarakat cenderung menjual hasil pertaniannya kepada pihak yang menawarkan harga lebih tinggi. Di Dusun Gerunung, misalnya, masyarakat pernah menanam melon, dan pembeli dari Kawo datang membeli hasil panen tersebut. Bahkan, pihak tersebut bersedia memberikan modal

untuk penanaman melon di Desa Ranggagata dengan sistem bagi hasil tanpa mengambil keuntungan tambahan”.

Hal diatas juga disampaikan oleh salah satu warga, Ibu Susi, yang menyatakan, “Tidak pernah dan belum pernah mendapatkan bantuan, karena bantuan modal selama ini tidak tepat sasaran.” Berdasarkan temuan tersebut, peneliti melihat bahwa pemerintah desa memang tidak menyediakan anggaran maupun bantuan yang jelas bagi masyarakat. Pandangan kepala desa yang berinisiatif mendatangkan juragan melon dan mengajak masyarakat untuk menanam melon secara serentak juga dinilai kurang tepat sebagai langkah peningkatan perekonomian. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa seharusnya terlebih dahulu fokus pada penyelesaian permasalahan dasar di sektor pertanian. Jika sektor pertanian sebagai mata pencaharian mayoritas masyarakat saja tidak dikelola dengan baik, maka upaya pengembangan sektor lainnya tentu akan sulit tercapai.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87, yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong, serta bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara kolektif. Lembaga ini tidak hanya mencerminkan upaya formalisasi kegiatan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga menjadi simbol revitalisasi ekonomi pedesaan yang berbasis pada kemandirian, partisipasi aktif warga, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan (Mulyadi, 2023; Rizzal Firmanudin et al., 2022). Di sisi kelembagaan, BUMDes Ranggagata mengalami stagnasi total sejak 2018. Program simpan-pinjam yang pernah berjalan berhenti akibat kredit macet, kurangnya pendampingan, dan rendahnya kapasitas pengurus. Tidak adanya regenerasi kepengurusan menyebabkan BUMDes kehilangan peran strategisnya sebagai motor penggerak ekonomi desa. Padahal banyak potensi yang dapat dikelola BUMDes seperti pengelolaan area futsal yang tidak produktif, penyediaan sarana pertanian, pengelolaan pasar desa, dan menjadi fasilitator dalam menyerap hasil panen masyarakat.

Hal diatas dibenarkan oleh kepala desa Ranggagata Bapak Muhamad Haikal mengatakan “Tidak ada peran yang berjalan optimal sejak awal BUMDes dibentuk pada tahun 2016. Pada tahun tersebut BUMDes mendapat bantuan berupa peralatan kantor, kemudian pada tahun 2018 memperoleh bantuan dana sebesar 100 juta rupiah untuk program simpan pinjam bagi masyarakat. Namun, program tersebut mengalami kemacetan karena sebagian masyarakat menganggap bahwa dana tersebut merupakan “uang desa” atau “uang pemerintah” sehingga tidak perlu dikembalikan. Selain itu, BUMDes menjadi tidak aktif karena direktur BUMDes melanjutkan studi S3 di luar negeri”.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan BUMDes, Bapak Danial Hafizd yang menjelaskan bahwa “BUMDes dibentuk pada tahun 2016 dan sejak awal sudah menjalankan beberapa unit usaha, seperti pengelolaan air minum dan air bersih melalui sumur bor yang dikelola BUMDes dan hasilnya masuk ke kas BUMDes. Program simpan pinjam juga pernah berjalan, namun hampir separuh dana tidak kembali meskipun menggunakan konsep syariah. Selain itu, unit usaha fotokopi dan ATK sempat beroperasi selama beberapa tahun, tetapi terkendala karena pengurus kurang aktif. Ke depannya, gedung futsal yang telah dibangun direncanakan akan dikelola oleh BUMDes”.

Menurut saya, dari perspektif Kepala Desa dan Direktur BUMDes, langkah yang dilakukan sudah cukup baik karena mereka telah memikirkan rencana pengembangan BUMDes ke depan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Danial Hafizd, “Langkah konkret sebetulnya adalah memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Di sisi lain, BUMDes harus berinovasi mengembangkan unit-unit usaha yang belum dijalankan masyarakat sehingga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, sekaligus menjadi penyuplai bagi unit-unit usaha yang ada di BUMDes.”

Selain itu, peneliti menemukan adanya peluang besar pada sektor hortikultura yang belum dimanfaatkan. Masyarakat memiliki lahan yang subur untuk pengembangan komoditas seperti melon, jagung manis, cabai, bawang merah, dan pisang. Namun, ketidakpastian pasar, minimnya pengetahuan teknis, dan ketiadaan jaminan harga membuat masyarakat enggan beralih dari padi. Padahal, desa-desa tetangga yang sudah melakukan kemitraan mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan, sehingga tidak hanya tergantung dari pendapatan saat panen padi saja.

Dari sisi sosial budaya, perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu hambatan besar bagi tumbuhnya ekonomi desa. Sebagian masyarakat lebih memilih pekerjaan musiman sebagai buruh tani yang bersifat instan, dibanding membangun usaha baru yang memerlukan kedisiplinan dan konsistensi jangka panjang. Perubahan perilaku dan norma sosial dalam masyarakat desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi lokal. Menurut Geertz (1963), budaya desa membentuk pola pikir, nilai, dan sikap masyarakat terhadap pekerjaan dan usaha ekonomi. Budaya yang cenderung mengutamakan hasil instan, seperti pekerjaan musiman, dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk berinvestasi dalam usaha jangka panjang yang memerlukan disiplin, konsistensi, dan kesabaran. Hal ini membuat program bantuan alat atau modal tidak efektif karena tidak diikuti dengan komitmen menjalankan usaha.

Hal di atas di benarkan oleh Kepala Desa Ranggagata Bapak Muhamad Haikal mengatakan "Kendala utama yang dihadapi adalah masyarakat itu sendiri. Pihak desa sudah berupaya menanyakan kebutuhan dan mendorong masyarakat untuk maju, namun pola pikir masyarakat dinilai masih bersifat primitif. Misalnya, mereka menanam hari ini lalu berharap hasilnya dapat dilihat dalam beberapa minggu saja. Pemerintah desa bahkan pernah mendatangkan pelatihan budidaya melon dan bawang serta melakukan kolaborasi antara Desa Ranggagata dan Desa Kateng, tetapi tetap tidak banyak masyarakat yang bersedia terlibat".

Hal di atas juga di tanggapi oleh masyarakat, salah satunya oleh Ibu Nursohan yang mengatakan bahwa pelatihan tersebut "tidak pernah" ada. Berdasarkan analisis saya sebagai peneliti, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya tepat jika pihak desa menyalahkan masyarakat karena dianggap tidak mau maju. Apabila sosialisasi dilakukan secara maksimal, sangat mungkin masyarakat mengetahui adanya pelatihan tersebut dan berpartisipasi di dalamnya.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa belum berbasis data potensi ekonomi desa. RPJMDes dan RKPDes masih berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan lingkungan dan drainase, sementara pembangunan ekonomi masyarakat tidak menjadi fokus utama. Tidak adanya basis data usaha, komoditas unggulan, potensi pasar, dan peta ekonomi desa menyebabkan perencanaan pembangunan tidak memiliki arah yang jelas. Ketiadaan evaluasi berkala memperparah ketidakefektifan kebijakan.

Seluruh temuan di atas menunjukkan bahwa strategi peningkatan ekonomi masyarakat Desa Ranggagata membutuhkan pendekatan sistemik. Pertama, BUMDes harus direformasi total melalui rekrutmen profesional, pendampingan ahli, dan fokus pada unit usaha realistis seperti jasa pertanian, perikanan, peternakan, pasar desa, air minum desa, atau pengelolaan lapangan futsal. Kedua, diversifikasi komoditas pertanian melalui pelatihan pertanian modern, lahan percontohan, dan kemitraan pengelolaan hasil pertanian perlu diprioritaskan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat harus beralih dari model bantuan alat menuju model pendampingan terpadu, misalnya selama 6-12 bulan. Keempat, pemerintah desa perlu meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2024, termasuk penganggaran BLT Desa sesuai ketentuannya, yaitu 15% untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan pemerintah pusat. Kelima, penyusunan RPJMDes berbasis data potensi ekonomi desa harus diwajibkan, disertai monitoring dan evaluasi program secara berkala.

Sementara itu, keberhasilan strategi peningkatan ekonomi desa juga membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif. Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap program pembangunan disusun melalui mekanisme musyawarah yang inklusif agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara tepat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penyampaian informasi publik menjadi kunci penting untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan tersebut, partisipasi warga dalam program pengembangan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan. Penguatan kelembagaan desa, penyediaan data yang akurat, serta koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait juga menjadi faktor penentu agar setiap kebijakan ekonomi memiliki arah, kesinambungan, dan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Desa Ranggagata.

Selain itu, proses pembangunan ekonomi desa membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan eksternal. Pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, sementara masyarakat juga membutuhkan kehadiran pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan arah, pendampingan, dan jaminan keberlanjutan program. Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi, lembaga pendamping desa, dan pelaku usaha menjadi peluang strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat, membuka akses pasar, serta mendorong inovasi ekonomi lokal. Jika kemitraan ini dibangun secara berkelanjutan, maka desa tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian musiman, tetapi juga mampu mengembangkan sektor-sektor baru yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pada akhirnya, perubahan ekonomi Desa Ranggagata sangat bergantung pada keberanian pemerintah desa untuk melakukan reformasi kebijakan dan penguatan tata kelola pembangunan secara menyeluruh. Pemerintah desa perlu mengubah pendekatan pembangunan dari yang bersifat reaktif dan seremonial menuju pendekatan yang berbasis data, terencana, dan berorientasi hasil. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berfokus pada pemecahan akar masalah, seperti rendahnya produktivitas pertanian, lemahnya kelembagaan ekonomi desa, minimnya diversifikasi usaha, serta rendahnya komitmen masyarakat terhadap usaha jangka panjang. Dengan komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, dan mekanisme evaluasi yang konsisten, Desa Ranggagata memiliki peluang besar untuk keluar dari kondisi stagnasi ekonomi dan bergerak menuju desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi Desa Ranggagata masih rentan akibat ketergantungan pada sektor pertanian tunggal, stagnasi kelembagaan ekonomi desa, minimnya program pemberdayaan masyarakat, dan rendahnya alokasi anggaran ekonomi, termasuk untuk BLT Desa yang hanya dialokasikan 1,45% dari total APBDes, jauh dari ketentuan maksimal 15% dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024. Rendahnya intervensi ini berdampak pada tidak optimalnya penanganan kemiskinan ekstrem di desa.

Fenomena kiosisasi semakin menunjukkan bahwa masyarakat berupaya bertahan hidup tetapi tidak ditopang oleh ekosistem ekonomi yang kuat. Selain itu, budaya kerja yang cenderung menginginkan hasil cepat menjadi faktor kultural yang menghambat perkembangan usaha. Perencanaan desa belum berbasis data potensi, sementara RPJMDes dan APBDes belum mencerminkan prioritas pembangunan ekonomi yang jelas.

Keseluruhan temuan ini menegaskan perlunya perubahan strategi yang komprehensif mencakup kebijakan, kelembagaan, perilaku masyarakat, dan tata kelola anggaran desa. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, Pemerintah Desa Ranggagata perlu segera melakukan reformasi kelembagaan ekonomi desa dengan menghidupkan kembali BUMDes melalui restrukturisasi organisasi, peningkatan kapasitas pengurus, dan pengembangan unit-unit usaha yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat. Reformasi ini penting karena BUMDes berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi lokal yang selama ini tidak berjalan. Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi dan penanganan kemiskinan secara lebih proporsional, termasuk menempatkan BLT Desa sesuai ketentuan maksimal 15% sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024. Penataan anggaran yang lebih tepat ini akan memungkinkan program-program ekonomi berjalan lebih masif, menyentuh kelompok miskin ekstrem, dan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan. Selain itu, diversifikasi komoditas pertanian harus didorong melalui kolaborasi dengan penyuluh, dinas teknis, dan sektor swasta, terutama dalam penerapan pola kemitraan,

agar petani memperoleh kepastian pasar serta harga. Upaya ini perlu diiringi dengan pergeseran model pemberdayaan dari sekedar bantuan alat menuju skema pendampingan intensif dalam manajemen usaha, literasi keuangan, pemasaran, dan penguatan kelompok usaha masyarakat. Pemerintah Desa juga harus menyusun RPJMDes berbasis data potensi ekonomi desa yang akurat sehingga arah kebijakan pembangunan menjadi lebih terukur, terarah, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Pada saat yang sama, perubahan pola pikir masyarakat juga harus menjadi agenda prioritas melalui edukasi berkelanjutan, sosialisasi, dan pembentukan kelompok usaha produktif yang disiplin serta berorientasi jangka panjang. Dengan serangkaian langkah yang terpadu ini, Desa Ranggagata memiliki peluang besar untuk memperkuat fondasi ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Elvandry, T., Amran, N., & Patrick, W., (2013). Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Arsa, I. K., & Setiawina, N. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013. *Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104–112.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*.
- Badan Pusat Statistik. *NTB Dalam Angka Tahun 2019*
_____. *NTB Dalam Angka Tahun 2020*
_____. *NTB Dalam Angka Tahun 2021*
_____. *NTB Dalam Angka Tahun 2022*
_____. *NTB Dalam Angka Tahun 2023*
- Tambunan, T. T. H. (2009). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Desa. (2025). *Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*. <https://jdih.kemendes.go.id>.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. University of California Press.
- Mulyadi, D. (2023). *Bumdes Mitra Jaya Mandiri Berperan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri*.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press.